



PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
BPR 2024**

PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI

2024

**JL.JEND. SUDIRMAN NO. 7D, KOMPLEKS BUSINESS PARK,
PEKANBARU, 28284**

DAFTAR ISI

BAB I	PENJELASAN UMUM	1
BAB II	FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA	
	KELOLA BPR	2
A.	Ringkasan Hasil Penilaian (Self Assessment) atas Penerapan Tata Kelola	2
B.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	3
	1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	3
	2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	7
	3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	8
C.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR	9
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR	9
D.	Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	10
	1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	10
	2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	10
E.	Hubungan Keuangan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
	1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR	11
	2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	11
	3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR	12
F.	Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
	1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR	14
	2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR	14
	3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR	15
G.	Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS	16
H.	Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah	17
I.	Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	17
J.	Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	18
K.	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	19
L.	Permasalahan Hukum yang Dihadapi	19
M.	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	20
N.	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain	20



BAB I

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mendukung terciptanya praktik perbankan yang sehat dan berintegritas, PT. BPR Putra Mahkota Mandiri senantiasa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkelanjutan. Penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan keberlanjutan usaha BPR.

Laporan transparansi pelaksanaan tata kelola ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kami terhadap kewajiban pengungkapan informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Melalui laporan ini, BPR mengungkapkan seluruh aspek yang mencerminkan penerapan prinsip transparansi. BPR juga secara aktif menyesuaikan kebijakan dan prosedur internal untuk selaras dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik industri, serta melakukan evaluasi berkala atas efektivitas penerapan tata kelola. tata kelola yang baik tidak hanya merupakan kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kepercayaan nasabah, regulator, dan masyarakat luas.

BAB II

FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	JL.JEND. SUDIRMAN NO. 7D, KOMPLEKS BUSINESS PARK, PEKANBARU, 28284
Nomor Telepon	081298404004
Penjelasan Umum	Struktur dan/atau infrastruktur yang diperlukan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekalipun masih terdapat rangkap jabatan namun tidak berdampak signifikan pada bisnis Bank. Selain itu, proses pelaksanaan tata kelola telah dilakukan dengan baik dan memadai, yang tercermin dari hasil pelaksanaan tata kelola yang menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang cukup dalam memastikan keberhasilan dan kelancaran tata kelola yang diterapkan. Tidak ada faktor negatif yang signifikan yang mempengaruhi tercapainya struktur dan infrastruktur yang diperlukan, sehingga proses dan hasil pelaksanaan tata kelola tetap berjalan dengan baik dan tidak ditemukan faktor eksternal atau internal yang dapat menghambat tata kelola, yang mendukung kelancaran proses tata kelola yang efektif.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	Manajemen BPR secara keseluruhan telah menjalankan tata kelola dengan baik, yang tercermin dalam pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang memadai. Prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah diterapkan dengan baik oleh manajemen sesuai dengan standar yang diharapkan dalam menjalankan operasional bank. Meskipun secara umum pelaksanaan tata kelola berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya namun tidak signifikan dan tidak mempengaruhi kinerja BPR. Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan tersebut dapat diatasi melalui tindakan-tindakan korektif yang biasa dilakukan oleh manajemen dalam rangka menjaga kelancaran operasional bank dan manajemen BPR mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sesuai prosedur, memastikan bahwa tata kelola tetap berjalan dengan baik. Dengan demikian pelaksanaan tata kelola oleh manajemen BPR secara umum telah dilakukan dengan baik.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1.	NIK : -
	Nama : Yuni Wulandari Putri, SE, Ak
	Jabatan : Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
	2. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan.
	3. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
	5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal BPR.
	6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangandan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta meminimalkan Risiko Kepatuhan BPR.
	7. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi BPR tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	8. Dalam melaksanakan tugas, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
	9. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah



melakukan pencegahan secara optimal namun masih terjadi penyimpangan, pertanggungjawaban atas penyimpangan yang terjadi merupakan tanggung jawab Direksi BPR dengan mempertimbangkan cakupan upaya pencegahan yang telah dilakukan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

10. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Direktur Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sekurang – kurangnya untuk:

- Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis bersifat strategis mengenai penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris.
- Memastikan adanya pembahasan terkait pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- Memastikan cakupan pengawasan aktif Direksi telah terpenuhi secara memadai.
- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia antara lain komitmen dalam Action Plan, Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data, dan hasil pengawasan Bank Indonesia yang terkait dengan penerapan Program APU dan PPT.
- Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan APU dan PPT.
- Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT.
- Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Mengusulkan Laporan Action Plan dan Laporan Rencana Pengkinian Data sebelum disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan



		11. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. 12. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merupakan Direktur Utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dewan Komisaris. 13. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
2.	NIK	: -
	Nama	: Syafril, S.Sos
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya. 2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan usaha BPR dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku. 3. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa keuangan yang berlaku. 4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di BPR. 5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>. 6. Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pejabat yang menangani Manajemen Risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR. 7. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.



8. Dalam rangka mendukung terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* BPR, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.
9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
10. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai ; sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi, program pengembangan pegawai dan mekanisme pemberhentian pegawai.
11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
12. Melaksanakan keterbukaan informasi, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah Perseroan kepada Pemangku Kepentingan.
13. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan BPR.
14. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Rekomendasi yang berikan Dekom terkait perluasan pangsa pasar dan peningkatan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit telah diupayakan pihak Bank dengan melaksanakan pemberian kredit didaerah pinggiran yang menurut pihak bank memiliki potensi besar dalam pemberian kredit dan pihak bank lebih prudent dalam pemberian kredit terhadap sektor-sektor yang berisiko tinggi



2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris
1.	NIK : -
	Nama : Herry Amin, SE
	Jabatan : Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memimpin dan Mengkoordinasi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi. 2. Mengarahkan Diskusi dan Rapat Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dan tujuan jangka panjang perusahaan. 3. Menjadi Penghubung antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam hal pelaporan, keputusan strategis, dan kebijakan yang mempengaruhi operasional Bank. 4. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. 5. Mengevaluasi dan Memimpin Penilaian Kinerja Direksi dengan melibatkan seluruh anggota Dewan Komisaris. 6. memastikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memahami tugas dan peran mereka dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. 7. Membuat Keputusan Strategis bersama Dewan Komisaris terkait pengawasan dan arahan kebijakan penting dalam jangka panjang. 8. Mengawasi Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris serta memastikan bahwa Dewan Komisaris bekerja sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dan efektif dalam melaksanakan pengawasan.
2.	NIK : -
	Nama : Fatmawati, SKM, MM
	Jabatan : Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategic, termasuk persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas



	maksimum pemberian kredit bank. 2. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. 3. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui Rencana Bisnis Bank. 4. Bersama-sama dengan komisaris utama mereview dan menyetujui laporan tahunan. 5. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 6. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan. 7. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris. 8. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham. 9. Memberikan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
	Rekomendasi kepada Direksi: Direksi diminta untuk melaksanakan ekspansi kredit lebih luas dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta menjaga NPL bank dalam kondisi sehat. Dana pihak ketiga yang memiliki fungsi intermediasi perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan promosi agar banyak masyarakat mengetahui tentang BPR dan mempercayakan dananya ke Bank. Direksi harus terus menjaga lingkungan kerja yang kondusif dengan memperhatikan tata kelola yang baik.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

PT. BPR Putra Mahkota Mandiri tidak memiliki Komite

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak ada	-	-
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak ada	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Herry Amin, SE	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	60%	60%
2	-	Fatmawati, SKM, MM	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	20%	20%

3. Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Nama Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	-	Herry Amin, SE	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	60%	60%
2	-	Fatmawati, SKM, MM	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	20%	20%
3	-	Erick Caesarrani Asmara	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	10%	10%
4	-	Alexander	PT. BPR Putra Mahkota Mandiri	10%	10%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	-	Tidak ada	-
2	-	Syafril, S.Sos	-	Tidak ada	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	Herry Amin, SE	-	1. PT. JASA KARYA UNGGUL PRIMA	11.50
				2. PT. MUSTIKA AGRO SARI	5.00
				3. PT. WANASARI NUSANTARA	5.00
				4. PT. MANDIRI BAKTI NUSANTARA	90.00

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham Erick Caesarrani Asmara dan Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor, dimana saham yang dimiliki merupakan hibah dari ibu Fatmawati, yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

3. Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham Erick Caesarrani Asmara dan Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor, dimana saham yang dimiliki merupakan hibah dari ibu Fatmawati, yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
3	-	Erick Caesarrani Asmara	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham Erick Caesarrani Asmara dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI

				Otoritas Jasa Keuangan	
4	-	Alexander	Tidak Ada	Terdapat hubungan keuangan antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dan pemegang saham Alexander masing-masing sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keuangan antara Pemegang Saham Alexander dengan Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham sebesar 10% dari modal disetor yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Yuni Wulandari Putri, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Syafril, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Herry Amin, SE	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	-	Fatmawati, SKM, MM	Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris dengan pemegang saham: Erick Caesarrani Asmara dan Alexander yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan



3. Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No.	NIK	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	-	Erick Caesarrani Asmara	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan
2	-	Alexander	Tidak Ada	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Komisaris yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan	Terdapat hubungan keluarga (ibu dan anak) antara Erick Caesarrani Asmara dengan ibu Fatmawati, SKM, MM selaku Pemegang Saham yang sudah diketahui dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp. 288.000.000	2	Rp. 162.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp. 37.000.000	2	Rp. 13.500.000
3.	Tantiem	2	Rp. 20.803.472	2	-
4.	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5.	Remunersi lainnya	-	-	-	-
	Total Remunerasi		Rp. 345.803.472		Rp. 175.500.000
	Jenis Fasilitas Lain				
1.	Perumahan	-	-	-	-
2.	Transportasi	-	-	-	-
3.	Asuransi Kesehatan	-	-	-	-
4.	Fasilitas Lainnya	-	-	-	-
	Total Fasilitas Lainnya		-		-
	Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		-		-

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan

Keterangan	Perbandingan
	a/b
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.67
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.92

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28/03/2024	2	1. Evaluasi Kinerja BPR triwulan Ke I tahun 2024 2. Laporan tahunan Bank tahun 2023 hasil audit KAP 3. Pembahasan terkait pemberlakuan SAK EP per Januari 2025 4. Tingkat kesehatan bank triwulan I tahun 2024 5. Pertumbuhan Kredit yang diberikan dan dana pihak ke III, 6. Kredit hapus buku dan tunggakan kredit
2.	28/06/2024	2	1. Evaluasi Kinerja BPR triwulan Ke II tahun 2024 2. Evaluasi terhadap ratio bank per Triwulan II-2024 3. Pertumbuhan kredit yang diberikan per triwulan II tahun 2024 4. Penanganan kredit bermasalah terhadap debitur yang sudah non performance terutama kredit macet 5. Penanganan terhadap kredit yang berada pada posisi dalam perhatian khusus yang memiliki tunggakan kredit 6. Pertumbuhan dana pihak ke III per triwulan II tahun 2024.



3.	30/09/2024	2	1. Evaluasi Kinerja BPR dan ratio Bank triwulan III tahun 2024 2. Pembahasan terkait pencapaian kredit yang diberikan dan dana pihak ke III 3. Perkembangan terkait proses ganti rugi jaminan atas nama halimah 4. Pembahasan terkait perkembangan proses lelang jaminan Hendri dan proses pengadilan debitur atas nama Selamat Sutrisno. 5. Pembahasan debitur yang sudah Non Performance Loan (NPL) terutama yang macet sekaligus pembentukan PPAP.
4.	31/12/2024	2	1. Evaluasi Kinerja BPR triwulan Ke IV tahun 2024 2. Pembahasan terkait kredit yang diberikan dana pihak ke III 3. Pembahasan posisi saldo Hapus Buku per Desember 2024 4. Pembahasan terkait tunggakan kredit dan NPL Bank per posisi Desember 2024 5. Pembahasan terkait strategi Bank untuk pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2024.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No.	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	-	Herry Amin, SE	4	-	100%
2.	-	Fatmawati, SKM, MM	4	-	100%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (dalam 1 tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam Proses Peyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

selama tahun 2024, Tidak adanya indikasi fraud yang ditemukan/dialami oleh PT. BPR Putra Mahkota Mandiri yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan komisaris dan/atau SDM yang ada pada Bank.

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Total	1	-

Gugatan sederhana dan sudah masuk pindana debitur atas nama selamat sutrisno yang telah berada dalam posisi macet



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			

Selama periode tahun 2024, tidak ditemukan adanya indikasi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Putra Mahkota Mandiri

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah (Rp)
1.	22/04/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan untuk AFT Turnament futsal se Riau	Panitia	-	Rp. 50.000
2.	18/10/2024	Kegiatan Sosial	Sumbangan turnamen fun match futsal	Firma Hukum Brother & Groups	-	Rp. 250.000



PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PUTRA MAHKOTA MANDIRI

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA
PT. BPR PUTRA MAHKOTA MANDIRI
TAHUN 2024

Menindaklanjuti pemenuhan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 9 tahun 2024 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 12/SEOJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat, maka dengan ini Direksi dan Komisaris PT. BPR Putra Mahkota Mandiri menyetujui Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2024 untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Pekanbaru, 30 April 2025
PT. Bank Perekonomian Rakyat
PUTRA MAHKOTA MANDIRI



Yuni Wulandari Putri, SE
Direktur Utama

Herry Amin, SE
Komisaris Utama